

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah sekian lama terpenjara dalam politik sentralisasi, daerah-daerah di Indonesia menjadi bisu terhadap aspirasi masyarakat lokal. Daerah tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan kontestasi politik di tingkat lokal yang lebih dilihat pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹ digulirkan dan diberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. Dan pertama kali di lakukan di Indonesia pada tahun 2005. Wujud dari otonomi daerah merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu wadah Negara Republik Indonesia²

Sebagai suatu pengembangan demokrasi adalah meluasi sistem pilkada langsung sebagai wujud otonomi daerah tetapi disisi lain terkadang mangisyaratkan 'konflik' yang mungkin dititikberatkan pada elite politik yang ada di tingkat lokal

¹ Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

² Mashuri. *Penetrasi Politik dalam Rekrutmen Elit Birokrasi (Studi Kasus Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Kendal)*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2007, hlm 2.

dalam mempertarungkan kepentingan masing-masing.³ Misalkan, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di lakukan pertama kali di Maluku Utara pada tahun 2007-2008. Konflik Pilkada terjadi berkat pertarungan sengit antara dua calon Gubernur yang pada saat itu mengungguli pasangan calon yang lain. Thaib Armayin⁴ yang didukung oleh partai PDI-P dan Demokrat sedangkan rivalnya Abdul Gafur⁵ yang didukung oleh partai Gorkar. Konflik ini terjadi melibatkan elite politik partai pendukung. Hal ini merupakan akibat dari pilkada 2001-2002 yang pada saat itu masih dipilih melalui DPRD.⁶

Faktor perubahan administratif yang diawali status Tidore pada tahun 2003 yang memekarkan diri dari Kabupaten Hamahera Tengah, dan sekarang menjadi Kota Tidore Kepulauan (Tikep). “Perubahan administratif yang terjadi akan menjanjikan penghargaan bagi siapapun berupa pekerjaan dan fasilitas baru”. Setelah lahirnya otonomi daerah pada tahun 2004 dengan sistem pemerintahan yang demokratis, memaksa elite-elite lokal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Di antara elite politik (Eksekutif dan Legislatif) yang ada di Tidore saat ini, sebagian merupakan elite non politik (kesultanan, tokoh agama, dan tokoh

³ Suharizal. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007, hlm 188.

⁴ Thaib Armayin adalah salah satu aktor elite lokal Maluku Utara (Malut) yang pada saat itu turut memperjuangkan pemekaran provinsi Malut pada tahun 1999 dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan di Malut demi mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain.

⁵ Abdul Gafur merupakan elite lokal Maluku Utara (Malut) yang berada di pusat pada waktu itu menggunakan logika terbalik untuk pemekaran provinsi Malut. Dengan mengatakan bahwa belum saatnya Malut dimekarkan karena pendapatan asil daerah (PAD) Malut tidak seberapa dan sebaiknya malut membangun dari Kabupaten ketika sudah dilihat layak untuk dimekarkan baru kemudian dimekarkan.

⁶ Rusdi J Abbas. *Demokrasi Di Aras Lokal: Praktek Politik Elite Lokal Di Maluku Utara*, Yogyakarta: Cerah Media, 2012, hlm 64.

masyarakat) Tidore yang menjelma dan menyesuaikan diri sebagai elite politik. Misalkan, Djafar Syah selaku Sultan Tidore pernah menjadi anggota DPD, dan Adam Dano pernah menjadi caleg di Tidore.

Suatu tuntutan terjadinya perubahan administratif di tingkat lokal dengan suatu pemerintahan yang demokratis, yang sudah barang tentu merupakan bagian dari peran elite-elite politik. Hal ini tidak menutup kemungkinan Tidore dalam dua periode, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015 dipimpin oleh putra asli daerah yang eksis di Jayapura dan pulang mencalonkan diri pada Pilwako tahun 2005, siapa lagi kalau bukan Achmad Mahifa. Pada saat itu merupakan hal baru bagi masyarakat Tidore karena banyak yang belum mengenali sosok Achmad Mahifa. Tetapi hal ini tidak menjadi penghalang untuk 'Beliau' menjadi Walikota.

Tidore dengan jumlah penduduk 92.564 jiwa pada tahun 2012⁷ dengan latar etnis yang homogen. Seiring dengan perkembangannya, Tidore mengalami 'metamorfosis politik gaya baru' yang dikenal dengan *gam-gam* (orang kota) dan *gura-gura* (orang luar kota; orang gunung).⁸ *Gam-gam* merupakan orang-orang yang notabenehnya adalah masyarakat wilayah kota yang pada masa awal reformasi hingga tahun 2005 mereka inilah yang banyak mengakses sumber daya lokal berupa kekuasaan di Tidore. Sedangkan *gura-gura* merupakan orang-orang yang dulunya tinggal di luar kota dengan kata lain 'orang gunung' yang sudah menyebar ke

⁷ Kota Tidore Dalam Angka, 2013.

⁸ *Gam-gam* dan *gura-gura* merupakan dua kelompok masyarakat di Tidore yang dinilai sering bersinggungan pada politik lokal Tidore ketika kemunculan Achmad Mahifa yang mencalonkan diri pada Pilwako Tidore tahun 2005 dan menjadi "isu" yang paling tren ketika itu.

berbagai daerah di Tidore dan mayoritasnya hanya bekerja sebagai ‘petani’ yang kehidupannya mulai berangsur-angsur berubah ketika Achmad Mahifa menjadi WaliKota Tidore selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015).

Kemunculan ‘Achmad Mahifa’ menjadi calon WaliKota Tidore periode 2005-2010 dan pada waktu yang bersamaan juga diiringi dengan terjadinya ‘dikotomi antara kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* yang sebelumnya belum muncul dipermukaan. Sehingga dinilai oleh berbagai pihak sebagai bentuk tidakan elite-elite politik tertentu yang sengaja mempergunakan menjadi ‘isu’ politik pada saat itu. Achmad Mahifa yang dicirikan sebagai kelompok *gura-gura* pada saat itu menggunakan ‘politik gaya baru’ Sebagai akibat historis yang merasa didiskriminasi. Secara kuantitas kelompok *gura-gura* yang sudah menjelma di kelurahan dan desa yang ada di Tidore. Maka hal ini dijadikan sebagai alat politisasi untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan menggunakan ‘politik gaya baru’ mengantarkan Achmad Mahifa menjadi WaliKota Tidore periode 2005-2010 dan 2010-2015. Dalam masa kepemimpinannya Tidore mengalami transformasi struktur pemerintahan, Milaskan, jabatan strategis seperti Kepala Dinas di Tidore juga ditempati kelompok *gura-gura* yang selama ini merasa didiskriminasi. Tidak cukup sampai disitu tetapi setiap momen penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga banyak dilimpahkan kepada masyarakat *gura-gura* seperti Kelurahan Gura Bunga, Kalaodi, Topo dan kelurahan lain yang menjadi bagian dari kelompok *gura-gura*.

Keberhasilan Achmad Mahifa, ditandai suatu kebangkitan kelompok *gura-gura* yang sudah sekian lama didominasi oleh kelompok *gam-gam* pada politik lokal

Tidore. Berperan di birokrasi Pemerintahan Tidore semakin meningkat seperti yang dijelaskan sebelumnya menandakan suatu transformasi politik lokal yang berkembang di Tidore. Eksistensi kelompok *gam-gam* terutama elite politik yang bersinar dalam panggung politik lokal Tidore mulai terancam dengan kebangkitan kelompok *gura-gura*. Politik lokal Tidore saat ini menggambarkan bahwa diantara kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* terutama kalangan elite politik yang selama ini selalu terciptanya relasi yang kurang harmoni, karena adanya faktor saling mendominasi di antara kedua kelompok ini yang pada prinsipnya elite politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka perlunya diadakan penelitian tentang “Dinamika Elite Politik Lokal Tidore Pada Masa Kepemimpinan Walikota Achmad Mahifa (2005-2015)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Sebelum Orde Reformasi digulirkan, jabatan birokrasi di Tidore dikuasai oleh kelompok elite politik *gam-gam* (orang kota). Setelah Orde Reformasi, pada tahun 2005 jabatan birokrasi di Tidore mulai ditempati kelompok elite politik *gura-gura* (orang luar kota: orang gunung) ditandai dengan keberhasilan Achmad Mahifa menjadi WaliKota Tidore. Terjadinya dikotomi antara elite politik kelompok *gam-gam* (orang kota) dan *gura-gura* (orang luar kota: orang gunung) terjadi ketika momentum Pilwako di Tidore periode 2005-2010. Tidore dalam momentum Pilwako periode 2010-2015 dikotomi antara kedua

elite politik kelompok *gam-gam* (orang kota) dan *gura-gura* (orang luar kota: orang gunung) mulai mencair dibandingkan dengan momen sebelumnya.

C. Fokus Penelitian

Narasi dari indentifikasi masalah di atas maka dapat mendorong peneliti dalam memfokuskan penelitian ini pada persaingan elite politik kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* di Tidore pada periode 2005-2015 yang disebabkan terjadinya perubahan struktur elite politik yang ada di Tidore. Karena dilihat sebagai masalah yang sangat esensial sehingga perlu mengelaborasi lebih dalam melalui suatu penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian masalah yang terungkap sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persaingan elite politik kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* di Tidore pada periode 2005-2015?
2. Bagaimana perubahan struktur elite politik yang terjadi di Tidore pada periode 2005-2015?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persaingan elite politik kelompok *gam-gam* dan *gura-gura* di Tidore pada periode 2005-2015.

2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur elite yang terjadi di Tidore pada periode 2005-2015.

F. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam Penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir peneliti melalui penulisan karya ilmiah dibidang ilmu sosial terutama disiplin ilmu Sosiologi.
2. Diharapkan lewat penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika elite politik lokal.
3. Dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang pada prinsipnya berkaitan dengan masalah yang sudah diteliti.